

**RANCANGAN RENCANA RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2026**



**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
AIR HAJI
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, OPD Kecamatan Linggo Sari Baganti telah menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin

Air Haji, Desember 2025

**KAMAT LINGGO SARI BAGANTI**
INTAN HARUN, S.STP
NIP. 19910731 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	11
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Linggo Sari BagantiTahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	11
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.3.1	Permasalahan dan hambatan	21
2.3.2	Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi ..	24
2.3.3	Tantangan dan peluang.....	26
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3	Program Dan Kegiatan.....	39
BAB IV	RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	48
BAB V	PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja dan Capaian Renstra Kecamatan Linggo Sari BagantiTahun 2024.....	13
Tabel 2.2	Analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti	19
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	31
Tabel 2.4	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari BagantiTahun 2026	38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026	41
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Linggo Sari BagantiTahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	46
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Linggo Sari BagantiTahun 2026.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan Pemerintahan yang menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen Perencanaan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam operasionalisasinya di lapangan.

Rencana kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis berbasis kinerja, dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

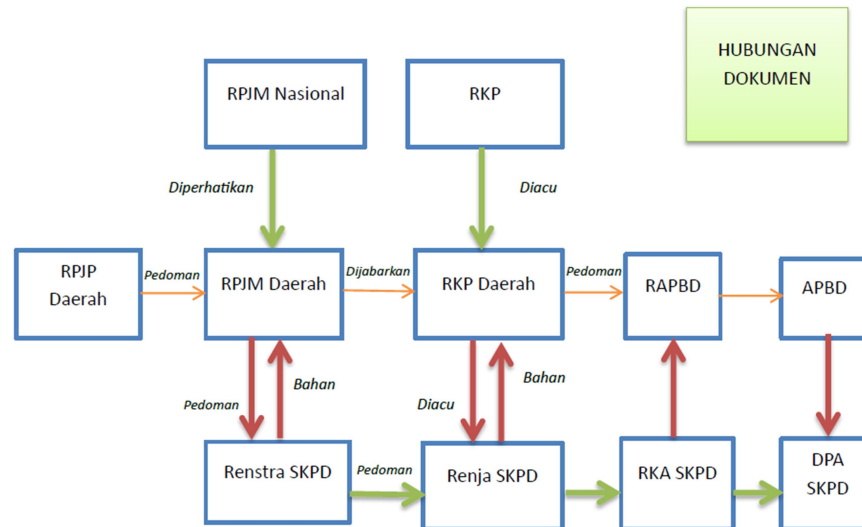
1. Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu
2. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
3. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
4. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya
5. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:
 - a. Transparatif dan akuntabilitas dalam perencanaan,
 - b. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah,
 - c. Berperan aktif pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2026 pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1 : Tahapan Penyusunan Rencana Kerja



Rencana kerja kecamatan Linggo Sari Baganti berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergisitas dengan program dan kebijakan Pemerintahan Pusat. Sebagai pedoman rencana tahunan, Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
- 2) Mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.
- 3) Kebijakan dari Pemerintah karena terjadinya pengurangan anggaran pada pergeseran anggaran Tahun 2025 karena efisiensi.
- 4) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja OPD Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah untuk

memetakan kebutuhan Kecamatan Linggo Sari Baganti selama 1(satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029, serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti, proses penyusunan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti, keterkaitan antara Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan dokumen Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan yang mengatur kewenangan Inspektorat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti.

1.2 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Berisikan kajian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti

3.3 Program dan kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V Penutup

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 senilai Rp. 2.070.857.742,-

(Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tjuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) terdiri dari 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub. Kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. 1.509.640.536- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara > 90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Beberapa indikator kinerja (berdasarkan Renstra) yang sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kinerja pelayanan, seperti : pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kecamatan Linggo Sari Baganti berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja pelayanan di kantor Camat Linggo Sari Baganti kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Nilai AKIP Pemerintahan Daerah.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik.
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (EPPGBM)
7. Persentase Konflik Yang Diselesaikan

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2024 terdapat 4 program kegiatan yang dengan status capaian "Sedang" (72.90). Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Pencapaian Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Kecamatan Linggo Sari Bagantidan Capaian
Renstra Kecamatan Linggo Sari BagantiTahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan

KOD E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)					Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2024	Ting kat Reali sasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n) (2025) 11			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6		7		8= (7/6)	9		10= (5+7+9)		11= (10/4)
7.01	KECAMATAN													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah												
7.01.01.2.01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah												
7.01.01.2.01.0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 dok	24 dok	6	dok	6	dok	100	6	dok	27	dok	75
7.01.01.2.01.0007 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300 dok	212 dok	53	dok	53	dok	100	53	Dok	235	dok	74,33
7.01.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %											
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 org/bln	48 org/bln	12	48 org/bln	12	48 org/bln	100	12	48 org/bln	51	48 org/bln	70,83
7.01.01.2.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 dok	48 dok	12	dok	12	dok	100	12	dok	53	dok	69,44

0002 -														
7.01.0 1.2.06 -	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7.01.0 1.2.06. 0001 -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 paket	24 paket	6	paket	6	paket	100	6	pkt	27	pkt	72,22
7.01.0 1.2.06. 0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	12 paket	12	paket	12	paket	100	6	pkrt	16	pkt	38,89
7.01.0 1.2.06. 0003 -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket											
7.01.0 1.2.06. 0004 -	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 paket	48 paket	12	paket	12	Paket	100	12	paket	54	pkt	70,83
7.01.0 1.2.06. 0005 -	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 paket	48 paket	12	paket	12	Paket	100	12	paket	54	pkt	70,83
7.01.0 1.2.06. 0008 -	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 paket	48 paket	12	paket	12	Paket	100	12	paket	53	Pkt	66,67
7.01.0 1.2.06. 0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800 laporan	600 laporan	120	lporan	120	lap	100	120	lap	660	lap	35,00
7.01.0 1.2.07 -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
7.01.0 1.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 paket	3 paket	3	paket	3	paket	100	3	paket	3	pkt	10,71
7.01.0 1.2.07. 0006 -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 paket	7 pkt	-	-	-	-	-	-	-	7	pkt	23,33
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

-														
7.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	48 lap	12	lap	12	Lap	100	12	Lap	53	Lap	66,67
7.01.0 1.2.08. 0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	48 lap	12	lap	12	Lap	100	12	Lap	53	lap	70,83
7.01.0 1.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik												
7.01.0 1.2.09. 0001 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 unit	16 unit	4	unit	4	Unit	100	4	Unit	18	unit	70,83
7.01.0 1.2.09. 0006 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	36 unit	9	unit	9	unit	100	9	unit	39	unit	76,47
7.01.0 1.2.09 .0009 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	8 unit	2	unit	2	unit	100	2	Unit	9	unit	75,00
7.01.0 1.2.09 .0010 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	3	5	unit	3	unit	100	5	unit	5	unit	6,67
7.01.0 2 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan												
7.01.0 2.2.04 -	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan												
7.01.0 2.2.04. 0002 -	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	640 lap	400 lap	100	lap	100	lap	100	100	lap	450	lap	64,06

7.01.0 2.2.04 -	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 lap	48 lap	12	lap	12	lap	100	12	lap	51	lap	70,83
7.01.0 3 -	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju												
7.01.0 3.2.01 -	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan												
7.01.0 3.2.01. 0001 -	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	180 usulan	140 usulan	30	lap	30-	lap	100	-	-	140	lap	77,78
7.01.0 3.2.01. 0003 -	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 lap	30 lap	10	lap	10	lap	100	10	lap	36	lap	60,00
7.01.0 4 -	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum												
7.01.0 4.2.01 -	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	24 lap	16 lap	4	lap	4	lap	100	4	lap	18	lap	75,00
7.01.0 4.2.01. 0001 -	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 lap	16 lap	4	lap	4	lap	100	4	lap	18	lap	75,00
7.01.0 5 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum												
7.01.0 5.2.01 -	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	600 org	400 org	100	org	100	org	100	100	org	500	org	84,00
7.01.0 5.2.01.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	600 org	400 org	100	org	100	org	100	100	org	500	org	84,00

0003 -		Bangsa												
7.01.0 6 -	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	60 nagari	40 Nagari	10	Nag	10	Nag	100	10	Nag	46	Nag	76,67
7.01.0 6.2.01 -	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)												
7.01.0 6.2.01. 0002 -	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 nagari	40 Nagari	10	Nag	10	Nag	100	10	Nag	46	Nag	76,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dengan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota, Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti,
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn+n)	Tahun 2023 (thn n- 2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Lkj Kecamatan	-	-	B	-	-	-	B	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2	Jumlah Dokumen informasi public PPID Pembantu	-	-	230	-	-	-	239	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
3	Jumlah Berita PPID pembantu			325	-	-	-	326	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
4	Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

5.	Nilai AKIP Pemerintahan Daerah	-	-	-	B	B	-	-	B	B	BB	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	85	85	-	-	85,25	89	89	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
7.	Nilai Kematangan Inovasi	-	-	-	75	75	-	-	87	89	89	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
8.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	-	75 %	75 %	-	-	100 %	100	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
9.	Angka Kemiskinan Ekstrim	-	-	-	0 %	0 %	-	-	0 %	0 %	0 %	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
10.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	-	-	-	-	1,74 %	-	-	2,92 %	2,5 %	2,5 %	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
11.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	-	-	-	-	80 %	-	-	100 %	100 %	100 %	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

Capaian kinerja dari pelayanan kecamatan Linggo Sari

BagantiTahun 2024 dari 4 indikator kinerja sebagai berikut :

- Nilai AKIP Pemerintahan Daerah
Dari hasil penilaian inspektorat kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2024 mendapatkan nilai LKj B (67,96) mempunyai akuntabilitas kinerja yang baik.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dari hasil survey kepada masyarakat yang melakukan pelayanan dikantor Camat Linggo Sari BagantiTahun 2024 memperoleh nilai IKM 89,75%.
- Nilai Kematangan Inovasi
Hasil dari penilaian Indeks Inovasi daerah oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Inovasi kecamatan Linggo Sari Bagantimemperoleh nilai kematangan 11.
- Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik.
Jumlah Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi dan laporan keuangan yang baik adalah 16 Nagari atau 95 %.
- Angka Kemiskinan Ekstrim.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim Kabupaten Pesisir Selatan 0%.
- Prevalensi Stunting (EPPGBM).
Kecamatan Linggo Sari BagantiPrevalensi Stunting (EPPGBM) Tahun 2024 mencapai 87 %.
- Persentase Konflik Yang Diselesaikan.
Konflik yang diselesaikan di kecamatan Linggo Sari BagantiTahun 2024 mencapai 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari dalam maupun dari luar Organisasi Perangkat Daerah. Adapun permasalahan pelayanan di Kecamatan Linggo Sari Baganti antara lain :

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Permasalahan tersebut antara lain : Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar

kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
3. Sarana dan prasarana kecamatan yang masih relatif kurang representatif.
4. Regulasi Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada. Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan

tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.

5. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Linggo Sari Bagantitelah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana serta kualitas personil yang tidak merata.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

3 Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak.

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan

ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. **Nagari Kanyang** : Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan
2. **Nagari Pandai** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. **Nagari Mengaji** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK
4. **Nagari Sehat** : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat
5. **Nagari Sejahtera** : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

Rangkuman singkat visi, misi dan 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka

secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 5 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

3.3.1 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti

3.3.1.1. Tantangan

Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.

1. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
2. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
3. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan,

adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.

4. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
5. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
6. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
7. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
8. SDM yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.

3.3.1.2 Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu :

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/personil.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang

berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset/ pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.

3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa

semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Proses usulan terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan isi isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah jika usulan yang diambil dari usulan musrenbang diusulkan dibuat hanya usulan prioritas saja. Untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. LSB	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	1.941.337.191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. LSB	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	1.941.337.191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		1.760.268	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		1.760.268	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	6	1.368.768	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	6	1.368.768	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)	53	391.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)	53	391.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		1.681.122.661,	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. LSB	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		1.681.122.661,	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. LSB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	1.631922.661	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. LSB	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (bulan)	168	1.631922.661	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. LSB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	49.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. LSB	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)	12	49.200.000	Penyediaan Administrasi

											asi Pelak sana an Tuga s ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. LSB	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		176.396.604,	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. LSB	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		176.396.604,	Admi nistr asi Umu m Peran gkat Daer ah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. LSB	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	6	2.687.842	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. LSB	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	6	2.687.842	Peny ediaa n Kom pone n Instal asi Listri k/Pe nera ngan Bang unan Kant or
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Kec. LSB	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	6		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Kec. LSB	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	6		Peny ediaa n Peral atan dan perle ngka pan gedu

											ng Kant or
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kec. LSB	Jumlah paket peralatan runah tangga yang disediakan	1		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kec. LSB	Jumlah paket peralatan runah tangga yang disediakan	1		Penyediaan Peralatan Rumah tangga

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. LSB	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan (paket)	12	30.078.780,	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. LSB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	30.078.780,	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. LSB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	4.440.000,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. LSB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	4.440.000,	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. LSB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)	12	26.862.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. LSB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)	12	26.862.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Kec. LSB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	112.328.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Kec. LSB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	112.328.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. LSB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. LSB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. LSB	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli		0,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. LSB	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli		0,	

	Pengadaan mebel	Kec. LSB	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	2		Pengadaan mebel	Kec. LSB	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	2		
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. LSB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	6	33.363.470	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. LSB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	6	33.363.470	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. LSB	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. LSB	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. LSB	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan		21.992.538,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. LSB	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan		21.992.538,	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. LSB	Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. LSB	Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. LSB	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	9.992.538	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. LSB	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	9.992.538	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. LSB	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		60.065.120	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. LSB	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		60.065.120	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. LSB	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	4	40.101.120	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. LSB	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	4	40.101.120	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. LSB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	5		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. LSB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	5		
	Pemeliharaan Mebel	Kec. LSB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3		Pemeliharaan Mebel	Kec. LSB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. LSB	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	19.964.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. LSB	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	19.964.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. LSB	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5		Kec. BAB Tapan	Kec. LSB	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. LSB	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. LSB	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. LSB	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. LSB	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. LSB	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	100		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. LSB	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	100		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. LSB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. LSB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	1		

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. LSB	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		42.690.000	- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. LSB	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		42.690.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. LSB	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan				Kec. LSB				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. LSB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	9.960.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. LSB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	9.960.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. LSB	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	10	32.730.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. LSB	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	10	32.730.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. LSB	Persentase permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. LSB	Persentase permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti	12.000.000,-		
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. LSB	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketntraman dan ketertiban umum			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. LSB	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketntraman dan ketertiban umum			
	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Kec. LSB	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinersitas Polri, TNI dan instansi vertikal (kasus)	4		Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Kec. LSB	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinersitas Polri, TNI dan instansi vertikal (kasus)	4		

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. LSB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. LSB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4		
5	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. LSB	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan			PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. LSB	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Kec. LSB	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Kec. LSB	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah			
	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Kec. LSB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100		Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Kec. LSB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. LSB	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik	100		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. LSB	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik	100		
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. LSB	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	12		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. LSB	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100		
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Kec. LSB	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)	12		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Kec. LSB	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)	100		
	JUMLAH										

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2026

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Strategi yang merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan menumbuhkan hasil pembangunan yang lebih optimal.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
2. Koordinasi lintas sektoral lebih ditingkatkan kembali untuk kelanjutan pembangunan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Linggo Sari Bagantimemiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “ Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahah Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi”.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Bagantimenetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Meningkatnya efektivitas pelayanan pemerintahan kecamatan
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan Nagari
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan..

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualirtas dan bersinergi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai AKIP kecamatan	BB (75,00)
		Meningkatnya efektivitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91
			Nilai Kematangan Inovasi kecamatan	80
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang memiliki administrasi yang baik	100
			Angka Kemiskinan ekstrim	0 %
			Prevalensi stunting (EPPGBM)	6,0%
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	100 %

3.3 Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029

yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

Jumlah Program : 6 (enam)

Jumlah Kegiatan : 10 (sepuluh)

Jumlah Sub Kegiatan: 29 (dua puluh sembilan)

Pagu Indikatif APBD: Rp. 1.842.976.016,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah*).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Semua Urusan

I. Semua Bidang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub.Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3. Administrasi umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
 - Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Fasilitasi kunjungan tamu.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan :
- Pengadaan mebel.
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub. Kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub. Kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

- Pemeliharaan rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Kegiatan : - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Sub.kegiatan :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Kegiatan : - Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

Sub kegiatan :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Sub, kegiatan :

- Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat.

5. Program koordinasi urusan pemerintahan umum

Kegiatan : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah.

Sub.kegiatan :

- Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa.

6. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Sub. Kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa/Nagari.

Program, kegiatan dan sub.kegiatan Kecamatan Linggo Sari Bagantikabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Uraian rumusan rencana program, kegiatan dan Sub.Kegiatan Kecamatan Linggo Sari BagantiKabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini:

TABEL 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan penting	Prakiraan Maju Thn 2027	
				Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	target capaian kinerja	Koordinat Geografis	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
1	2	3	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib											
	Kecamatan Linggo Sari Baganti											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten		Kec. LSB		- 2.165833 33,101.07 02778		1,998,000,000.00	Pendapatan Transfer			1,998,000,000.00
	Kegiatan :			Kec. LSB								
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Kec. LSB			59	6,000,000.00			59	6,000,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		Kec. LSB			6	3,000,000.00			6	3,000,000.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)		Kec. LSB			53	3,000,000.00			53	3,000,000.00
				Kec. LSB								

7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah admistrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		Kec. LSB			180	1,650,000,000.00			180	1,650,000,000.00
7.01.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)					168	1,600,000,000.00			168	1,600,000,000.00
7.01.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		Kec. LSB			12	50.000.000			12	50.000.000
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		Kec. LSB				127.000.000.00				127.000.000.00
7.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. LSB			6	4.000.000			6	4.000.000
7.01.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. LSB			6	-			6	-
7.01.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					1				1	

7.01.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec. LSB			12	16.000.000			12	16.000.000
7.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		Kec. LSB			12	4,000,000.00			12	4,000,000.00
7.01.01 .2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kec. LSB			12	13.000.000			12	13.000.000
7.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		Kec. LSB			12	90,000,000.00			12	90,000,000.00
7.01.01 .2.06.0 010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kec. LSB			12				12	
7.01.01 .2.06.0 009	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. LSB								
7.01.01 .2.06.0 7.0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		Kec. LSB			2				2	
7.01.01 .2.06.0 7.0006	Pengadaan peralatan Mesin lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang disediakan		Kec. LSB				12,000,000.00			2	12,000,000.00

7.01.01 .2.06.0 7.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Kec. LSB			1				1	
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. LSB				153,000,000.00				153,000,000.00
7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		Kec. LSB			12	13,000,000.00			12	13,000,000.00
7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umumkantor yang disediakan		Kec. LSB			12	140.000.000.00			12	140.000.000.00
X.XX.0 1.07..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		Kec. LSB				50,000,000.00				50,000,000.00
7.01.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak		Kec. LSB			4	45,000,000.00			4	45,000,000.00
7.01.01 .2.09.0 005	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kec. LSB			3				3	

7.01.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)		Kec. LSB			5				5	
7.01.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		Kec. LSB			2	5.000.000			2	5.000.000
7.01.01 .2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)		Kec. LSB		Kec. BAB Tapan	5				5	
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		Kec. LSB		- 2.165833 33,101.07 02778	62	5,000,000.00	Pendapatan Transfer		62	5,000,000.00
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Kec. LSB				5,000,000.00			62	5,000,000.00
7.01.02 .2.04.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)		Kec. LSB			100				100	
7.01.02 .2.04.0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)		Kec. LSB			1				1	
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		Kec. LSB		- 2.1658333 3,101.070 2778	22	15,000,000.00	Pendapatan Transfer		22	15,000,000.00

7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		Kec. LSB				11.000.000.00				11.000.000.00
7.01.03 .2.01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		Kec. LSB			10	4,000,000.00			10	4,000,000.00
7.01.02 .2.04.0 3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. LSB			10	7,000,000.00			10	7,000,000.00
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		Kec. LSB		- 2.1658333 3,101.070 2778	7	5,000,000.00	Pendapatan Transfer		7	5,000,000.00
7.01.04 .2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketntraman dan ketertiban umum		Kec. LSB				5,000,000.00			7	5,000,000.00
7.01.04 .2.01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. LSB			4				4	
7.01.04 .2.01	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Kec. LSB			4	5,000,000.00			4	5,000,000.00

7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		Kec. LSB		- 2.1658333 3,101.070 2778	100	8,000,000.00	Pendapatan Transfer		100	8,000,000.00
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		Kec. LSB				8,000,000.00				8,000,000.00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)		Kec. LSB			200	4,000,000.00			200	4,000,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik		Kec. LSB		- 2.1658333 3,101.070 2778	100	5,000,000.00	Pendapatan Transfer		100	5,000,000.00
7.01.06.201	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Kec. LSB				5,000,000.00			100	5,000,000.00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)		Kec. LSB			12	5.000.000			12	5.000.000
JUMLAH								2.031.000.000				2.031.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Linggo Sari Baganti ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana Tabel. 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTITAHUN 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan penting
				Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	target capaian kinerja	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	3	4	8	5	6	7	8	9
	Urusan Wajib									
	Kecamatan Linggo Sari Baganti									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten		Kec. LSB		- 2.16583333,101.0702778		1.941.337.191	Pendapatan Transfer	
	Kegiatan :			Kec. LSB				1.760.268		
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Kec. LSB			59	1.368.768		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		Kec. LSB			6	391.500		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)		Kec. LSB			53	1.681.122.661,		
				Kec. LSB				1.631922.661		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		Kec. LSB			180	49.200.000		

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)					168			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		Kec. LSB			12	176.396.604,		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		Kec. LSB				2.687.842		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. LSB			6			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. LSB			6			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					1			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec. LSB			12	30.078.780,		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		Kec. LSB			12	4.440.000,		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kec. LSB			12	26.862.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		Kec. LSB			12	112.328.000		

7.01.01.2.06.00 10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kec. LSB			12			
7.01.01.2.06.00 09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. LSB				0,		
7.01.01.2.06.07. 0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		Kec. LSB			2			
7.01.01.2.06.07. 0006	Pengadaan peralatan Mesin lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang disediakan		Kec. LSB				33.363.470		
7.01.01.2.06.07. 0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Kec. LSB			1			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. LSB				21.992.538,		
7.01.01.2.08.00 02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		Kec. LSB			12	12.000.000		
7.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umumkantor yang disediakan		Kec. LSB			12	9.992.538		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		Kec. LSB				60.065.120		

7.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak		Kec. LSB			4	40.101.120		
7.01.01.2.09.00 05	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kec. LSB			3			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)		Kec. LSB			5			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		Kec. LSB			2	19.964.000		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)		Kec. LSB			5			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		Kec. LSB		- 2.16583333,101.07 02778	62		Pendapatan Transfer	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Kec. LSB						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)		Kec. LSB			100			
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)		Kec. LSB			1			

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		Kec. LSB		- 2.16583333,101.070 2778	22	42.690.000	Pendapatan Transfer	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		Kec. LSB						
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		Kec. LSB			10	9.960.000		
7.01.02.2.04.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. LSB			10	32.730.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		Kec. LSB		- 2.16583333,101.070 2778	7		Pendapatan Transfer	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketntraman dan ketertiban umum		Kec. LSB						
7.01.04.2.01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. LSB			4			
7.01.04.2.01	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Kec. LSB			4			

7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		Kec. LSB		- 2.165833333,101.070 2778	100		Pendapatan Transfer	
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		Kec. LSB						
7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)		Kec. LSB			200			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik		Kec. LSB		- 2.165833333,101.070 2778	100		Pendapatan Transfer	
7.01.06.201	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Kec. LSB						
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)		Kec. LSB			12			
JUMLAH										

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2025–2029. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.